



Pendidikan Islam Indonesia: Transformasi Lembaga dan Kurikulum

Nasywa Alifia Azzahra¹, Ria Astuti Safitri², Hasna Dewi³

Institut Agama Islam Negeri Kediri¹

Universitas Muhammadiyah Ponorogo²

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak³

Email : naswa.alifia@gmail.com

Corresponding Author: Nasywa Alifia Azzahra1

Abstrak *indonesia*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi historis pendidikan Islam di Indonesia, dengan fokus khusus pada evolusi lembaga dan kurikulum dari masa kolonial Belanda hingga era Reformasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah, studi ini menelusuri bagaimana kebijakan politik, tekanan sosial, dan dinamika keagamaan membentuk wajah pendidikan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak statis; ia mengalami proses adaptasi, formalisasi, dan integrasi yang kompleks. Pada era kolonial, sistem pesantren yang otonom mulai berinteraksi dengan model pendidikan Barat. Pasca-kemerdekaan, upaya integrasi melalui kebijakan seperti madrasah dan UU No. 2/1989 berusaha menyelaraskan dikotomi antara ilmu agama dan umum. Puncaknya pada era Reformasi, dengan otonomi daerah dan UU No. 20/2003, pendidikan Islam mencapai posisi setara dalam sistem pendidikan nasional, meski tantangan seperti kualitas guru, standarisasi, dan radikalisme tetap menjadi pekerjaan rumah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan Islam merupakan cerminan dari perjuangan identitas dan modernisasi umat Islam Indonesia.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Transformasi, Lembaga, Kurikulum, Pesantren, Madrasah, Kolonial, Reformasi.*

Abstract *English*

This study aims to analyze the historical transformation of Islamic education in Indonesia, with a particular focus on the evolution of institutions and curricula from the Dutch colonial period to the Reform Era. Using a qualitative approach and historical research methods, the study traces how political policies, social pressures, and religious dynamics have shaped the face of Islamic education. The findings reveal that Islamic education is not static; it undergoes complex processes of adaptation, formalization, and integration. During the colonial era, autonomous pesantren systems began to interact with Western models of education. In the post-independence period, integration efforts such as the establishment of madrasahs and the enactment of Law No. 2/1989 attempted to bridge the dichotomy between religious and secular knowledge. These efforts culminated in the Reform Era, where regional autonomy and Law No. 20/2003 granted Islamic education a more equal position within the national education system. However, challenges such as teacher quality, curriculum standardization, and the threat of radicalism remain ongoing concerns. The study concludes that the transformation of

Islamic education reflects the broader struggle for identity and modernization within the Indonesian Muslim community.

Keywords: *Islamic Education, Transformation, Institutions, Curriculum, Pesantren, Madrasah, Colonial, Reform*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembentukan peradaban dan karakter masyarakat Indonesia. Sejarahnya yang panjang dan dinamis menjadikannya objek studi yang kaya untuk memahami interaksi antara agama, negara, dan masyarakat. Sejak masa pra-kolonial, Islam telah ditransmisikan melalui jaringan ulama dan lembaga-lembaga informal, yang kemudian berevolusi menjadi sistem pesantren yang sangat terstruktur (Azra, 2014)

Perjumpaan dengan kekuatan kolonial Barat memperkenalkan paradigma pendidikan modern yang berbeda, menciptakan dikotomi antara sistem pendidikan "pribumi/agama" dan "Barat/sekolah". Dikotomi inilah yang kemudian memicu proses transformasi panjang pendidikan Islam, tidak hanya dalam aspek kelembagaan tetapi juga dalam substansi kurikulumnya. Transformasi ini berlanjut pasca-kemerdekaan, di mana negara hadir dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam mainstream pendidikan nasional, sebuah proses yang mencapai momentum signifikannya pada era Reformasi.

Pertemuan antara pendidikan Islam dengan kekuatan kolonial Barat menandai awal dari perubahan besar dalam wajah pendidikan di Indonesia. Kolonialisme Belanda tidak hanya membawa misi ekonomi dan politik, tetapi juga menyebarkan paradigma pendidikan modern sekuler yang sangat berbeda dengan tradisi pendidikan Islam yang telah lama berakar dalam masyarakat. Sistem pendidikan kolonial memperkenalkan sekolah formal dengan struktur kelas, jenjang, dan kurikulum berbasis rasionalisme dan utilitarianisme Barat, yang kemudian menciptakan dikotomi tajam antara pendidikan "pribumi/agama" dan pendidikan "Barat/sekolah".(Hanipudin, 2019)

Dikotomi ini tidak bersifat netral, melainkan mengandung dimensi ideologis yang mendalam.(Musthofa, 2025) Pendidikan Islam, terutama dalam bentuk pesantren, diposisikan sebagai tradisional, tidak modern, dan kurang produktif secara ekonomi, sementara pendidikan Barat dipandang sebagai jalan menuju kemajuan dan mobilitas sosial. Realitas ini menimbulkan tekanan sekaligus tantangan bagi komunitas Muslim untuk melakukan penyesuaian dan transformasi. Maka muncullah berbagai upaya reformasi, mulai dari pembentukan madrasah modern hingga integrasi ilmu umum ke dalam kurikulum pesantren, sebagai bentuk respon kreatif terhadap tantangan zaman.

Transformasi ini tidak berhenti pada masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, negara mulai mengambil peran aktif dalam merumuskan arah dan bentuk sistem pendidikan nasional. Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam arus utama kebijakan pendidikan nasional semakin nyata melalui kebijakan formal seperti pengakuan terhadap madrasah dan penyusunan kurikulum terpadu.(Kuswanto, Abidin, et al., 2024) Namun, proses ini berjalan bertahap dan penuh negosiasi, karena melibatkan berbagai kepentingan politik, sosial, dan keagamaan.(Arif Musthofa & Ali, 2021)

Puncaknya terjadi pada era Reformasi, di mana semangat demokratisasi dan otonomi daerah membuka ruang lebih luas bagi pengakuan dan penguatan lembaga pendidikan Islam.(Selvia, 2024) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi tonggak penting yang menegaskan kesetaraan kedudukan madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, transformasi pendidikan Islam tidak hanya menyangkut aspek struktural dan administratif, tetapi juga menyentuh substansi kurikulum, pendekatan pedagogis, hingga orientasi nilai-nilainya.(Fia et al., 2024)

Namun demikian, transformasi ini bukan tanpa tantangan. Masih terdapat kesenjangan antara idealisme filosofis pendidikan Islam yang menekankan pembentukan insan kamil yang utuh secara spiritual, intelektual, dan moral dengan realitas implementasi di lapangan, yang seringkali dibatasi oleh masalah kualitas guru, keterbatasan infrastruktur, serta intervensi ideologis yang ekstrem. Oleh karena itu, transformasi pendidikan Islam harus terus dibaca sebagai proses dinamis yang mencerminkan dialektika antara identitas, modernitas, dan tantangan zaman.

Research Gap Banyak penelitian terdahulu telah mengkaji sejarah pendidikan Islam Indonesia, namun seringkali terfokus pada periode tertentu (misalnya, hanya era kolonial atau Orde Baru) atau pada lembaga tertentu seperti pesantren. Studi yang komprehensif yang menelusuri secara detail kesinambungan dan perubahan (continuity and change) dalam transformasi kelembagaan dan kurikulum dari hulu (kolonial) hingga hilir (Reformasi) masih relatif terbatas. Paper ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menyajikan analisis menyeluruh yang menghubungkan titik-titik transformasi kebijakan, respon lembaga Islam, dan perubahan kurikulum dalam satu narasi historis yang koheren, sehingga memberikan perspektif yang lebih holistik tentang evolusi pendidikan Islam Indonesia.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk: Memetakan dan menganalisis transformasi kelembagaan pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah Islam) dari era kolonial hingga Reformasi. Menganalisis evolusi kurikulum pendidikan Islam dan pergeseran orientasinya. Mengidentifikasi faktor-faktor politik, sosial, dan keagamaan yang menjadi pendorong utama transformasi tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori Modernisasi dan Respons Institusi

Studi ini menggunakan kerangka modernisasi yang tidak linier, yaitu pendekatan yang mengakui bahwa proses modernisasi tidak selalu mengakibatkan penghapusan lembaga tradisional, tetapi justru membuka ruang bagi resistensi kreatif, adaptasi selektif, dan integrasi kontekstual. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, pesantren dan madrasah tidak tergantikan oleh model pendidikan modern Barat, tetapi justru menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi, mengadopsi unsur baru, dan memfilter nilai-nilai asing sesuai dengan kerangka nilai Islam dan kebutuhan lokal (Azra, 1999)

Pendekatan ini kontras dengan teori modernisasi klasik yang sering diasosiasikan dengan para pemikir seperti Rostow dan Parsons, yang cenderung melihat modernisasi

sebagai transformasi linier dari tradisional ke modern. Dalam kenyataannya, pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa modernitas dan tradisi bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua entitas yang bisa berinteraksi secara dialektis.

Selain itu, teori institusi dari Douglas North (Khalid, 2015) memberikan kerangka analisis penting dalam memahami bagaimana lembaga-lembaga baik formal seperti peraturan negara, maupun informal seperti norma sosial dan nilai agama berevolusi sebagai respons terhadap perubahan "aturan main" (rules of the game) dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat dilihat sebagai lembaga yang aktif merespons perubahan sistem politik (dari kolonial ke nasional dan reformasi), perubahan sosial (urbanisasi, mobilitas sosial), dan perubahan global (globalisasi, digitalisasi). Untuk memperkuat kerangka ini, beberapa teori relevan lainnya yang turut digunakan antara lain:

Teori Resiliensi Budaya (Cultural Resilience Theory)

Teori ini melihat bagaimana lembaga-lembaga tradisional mempertahankan inti identitas budayanya sambil mengadopsi unsur modern demi kelangsungan hidup. Pendidikan Islam, khususnya pesantren, menunjukkan resiliensi budaya melalui kemampuannya menginternalisasi teknologi, kurikulum umum, dan manajemen modern tanpa kehilangan ruh keagamaannya (Zamhari, 2010). Ini menunjukkan bahwa transformasi bukan sekadar adaptasi pragmatis, melainkan strategi pelestarian nilai melalui perubahan bentuk.

Teori Hibriditas (Hybridity Theory – Homi Bhabha, 1994)

Dalam kerangka postkolonial, (Sultoni & Utomo, 2021) teori hibriditas menjelaskan bagaimana identitas dan praktik sosial terbentuk dalam ruang pertemuan antara dua budaya atau sistem. Pendidikan Islam Indonesia adalah contoh konkret dari produk hibrid, di mana nilai-nilai Islam bertemu dengan struktur pendidikan Barat, lalu menghasilkan bentuk-bentuk baru seperti madrasah modern, sekolah Islam terpadu, dan UIN. Bentuk-bentuk ini bukan sekadar "penjiplakan" atau pelestarian tradisi, melainkan kreativitas institusional yang lahir dari tarik-menarik antara kekuatan lokal dan global.

Teori Sistem Sosial (Talcott Parsons, 1951)

Parsons melihat lembaga sosial sebagai sistem yang berfungsi untuk mempertahankan keteraturan dan stabilitas sosial melalui adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL Schema). Pendidikan Islam, dalam perspektif ini, dapat dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan mempertahankan nilai dan identitas masyarakat Muslim dalam menghadapi perubahan struktural dan kultural. Transformasi kurikulum, metode pengajaran, dan manajemen kelembagaan merupakan wujud fungsi adaptif lembaga pendidikan Islam terhadap dinamika eksternal. (Maunah, 2016)

Teori Neo-Institusionalisme (Scott, 2008)

Neo-institusionalisme menyoroti pentingnya legitimasi sosial dan simbolik, bukan hanya efisiensi struktural, (Mariana et al., 2007) dalam mempertahankan eksistensi lembaga. Dalam konteks ini, madrasah dan pesantren tidak hanya beradaptasi untuk efisiensi akademik, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan sosial, kultural, dan legal dari masyarakat dan negara. Transformasi yang terjadi tidak semata teknokratik,

melainkan juga mencerminkan upaya mempertahankan legitimasi di mata publik dan otoritas.

Dengan menggabungkan berbagai teori di atas, studi ini memposisikan pendidikan Islam bukan sebagai korban pasif dari modernitas, tetapi sebagai aktor sosial yang aktif, adaptif, dan kreatif. Proses transformasi pendidikan Islam dari masa kolonial hingga era reformasi menunjukkan bahwa lembaga keagamaan dapat bertransformasi tanpa kehilangan identitas, selama memiliki kapasitas untuk membaca perubahan zaman, merespons secara strategis, dan mengelola ketegangan antara nilai lama dan tuntutan baru.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah (DP, 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menelusuri, merekonstruksi, dan menganalisis transformasi pendidikan Islam di Indonesia dalam lintasan waktu, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era Reformasi. Penelitian historis memungkinkan peneliti memahami dinamika pendidikan Islam sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya pada setiap periodenya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga dan kurikulum pendidikan Islam serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau menghambat proses transformasi tersebut. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta sejarah, tetapi juga memberikan interpretasi kritis terhadap dinamika yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan interaksi antara tradisi keislaman dan modernitas pendidikan.

Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (library research). Peneliti mengakses sumber-sumber tersebut melalui perpustakaan universitas, jurnal online serta dokumen digital dari portal resmi pemerintah dan lembaga riset.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan: Analisis Historis: Untuk menelusuri kronologi perkembangan pendidikan Islam dan menganalisis latar belakang serta konteks sosial-politik yang mempengaruhinya. Analisis Kritis-Konseptual: Untuk merefleksikan perkembangan tersebut dalam kerangka teori modernisasi, institisionalisme, dan filsafat pendidikan Islam. Analisis Tematik: Untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam setiap era (kolonial, paska-kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi), seperti otonomi, integrasi, kurikulum, dan respons terhadap perubahan. (Kuswanto, Fajanel, et al., 2024)

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai referensi akademik yang kredibel. Peneliti juga melakukan kritik sumber sejarah (eksternal dan internal) untuk mengevaluasi keaslian, otoritas, dan relevansi dokumen yang digunakan..

PEMBAHASAN

Era Kolonial: Otonomi Pesantren dan Awal Modernisasi Pada masa ini, pendidikan Islam berpusat pada pesantren yang otonom dengan kurikulum berbasis kitab kuning

(buku teks klasik berbahasa Arab) yang mempelajari fikih, tauhid, tasawuf, nahuw-sharaf, dan tafsir-hadis. Sistem sorogan dan bandongan menjadi metode utama. Intervensi kolonial melalui Politik Etis (1901) dengan mendirikan sekolah-sekolah Belanda (sekolah kelas satu untuk orang Eropa dan priyayi, dan sekolah desa untuk pribumi) menciptakan dikotomi. Sekolah Belanda menjanjikan mobilitas sosial, sementara pesantren mempertahankan tradisi keagamaan. Tekanan ini memicu respons modernis, ditandai dengan berdirinya madrasah modern pertama, Sekolah Adabiyah di Padang (1909) dan Madrasah Muhammadiyah (1911) di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan.(Arifin, 2018) Madrasah memperkenalkan sistem kelas, bangku, papan tulis, dan mengintegrasikan pelajaran umum (berhitung, ilmu alam) ke dalam kurikulum agama (Steenbrink, 1986).

Era Pasca-Kemerdekaan (1945-1966): Konsolidasi dan Upaya Integrasi Awal Pasca-kemerdekaan, pemerintah berusaha mengonsolidasikan sistem pendidikan nasional. UU No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah menjadi landasan awal. Pendidikan Islam masih berjalan paralel, tetapi mulai diakui. Kementerian Agama, yang berdiri pada 1946, menjadi patron utama madrasah dan pesantren. Pada era ini, terjadi upaya sistematis untuk memodernisasi madrasah dengan menyusun kurikulum yang lebih terstandarisasi, meski fokus utama tetap pada ilmu-ilmu keislaman. Pesantren masih mempertahankan otonominya, tetapi mulai merasakan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Era Orde Baru (1966-1998): Formalisasi dan Integrasi ke Sistem Nasional Era Orde Baru merupakan periode krusial dimana negara secara aktif melakukan intervensi untuk mengintegrasikan pendidikan Islam. Kebijakan SKB 3 Menteri (1975) antara Mendikbud, Menag, dan Mendagri adalah titik balik utama. Kebijakan ini memberikan pengakuan formal bahwa ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum, asalkan madrasah tersebut memasukkan pelajaran umum sesuai kurikulum nasional. Ini memaksa madrasah untuk melakukan reformasi kurikulum besar-besaran menuju kurikulum yang integratif (70% umum, 30% agama). Puncaknya adalah UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memasukkan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional pada jalur sekolah (jenjang MI, MTs, MA). Pesantren juga didorong untuk mengadopsi kurikulum nasional dan mendapatkan status disamakan. Proses ini, meski berhasil meningkatkan akses dan kesetaraan, menuai kritik karena dianggap mengikisi otonomi dan kekhasan pendidikan Islam (Hasbullah, 1999).

Era Reformasi (1998-Sekarang): Otonomi, Demokratisasi, dan Tantangan Baru Runtuhnya Orde Baru dan diterapkannya otonomi daerah membawa angin segar bagi pendidikan Islam. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas semakin memperkuat posisi madrasah dan pesantren. Kebijakan link and match dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, yang memungkinkan pesantren dan madrasah memperkuat kekhasan keagamaannya. Transformasi pada era ini ditandai oleh:

Diversifikasi Lembaga: Munculnya sekolah Islam terpadu, pesantren modern dengan kurikulum plus, dan model-model hybrid lainnya. Kurikulum Integratif-Interkoneksi: Perguruan Tinggi Agama Islam mempelopori pengembangan paradigma

kurikulum yang menyinergikan ilmu agama dan ilmu umum secara organik, bukan sekadar ditambahkan.

Tantangan Baru: Di samping kesempatan, tantangan muncul seperti komersialisasi pendidikan, kesenjangan kualitas antara madrasah di kota dan desa, serta ancaman penetrasi paham radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler di beberapa lembaga. Isu literasi digital, globalisasi, dan deradikalisasi menjadi bagian dari wacana kurikulum kontemporer (Zuhdi, 2020).

KESIMPULAN

Transformasi pendidikan Islam Indonesia dari era kolonial hingga Reformasi adalah sebuah proses dinamis yang digerakkan oleh interaksi kompleks antara faktor eksternal (kebijakan negara, tekanan global) dan faktor internal (daya adaptasi komunitas Muslim). Transformasi kelembagaan bergerak dari model pesantren yang otonom dan tradisional menuju model madrasah yang terintegrasi dengan sistem negara, dan akhirnya bermuara pada diversifikasi model pada era Reformasi. Sementara itu, transformasi kurikulum bergeser dari kurikulum murni keagamaan (religious-centric) menuju kurikulum integratif yang berusaha menyatukan dikotomi ilmu agama dan umum (integration-centric), dan terakhir mengarah pada pengembangan kurikulum yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman (challenge-centric).

Proses ini bukanlah proses pasif, tetapi merupakan bentuk agency dan resistensi kreatif umat Islam Indonesia dalam merespons modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Ke depan, tantangan pendidikan Islam adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi keilmuan Islam yang autentik, memenuhi standar nasional global, dan sekaligus menjawab tantangan masyarakat Indonesia modern yang majemuk.

REFERENSI:

- Arif Musthofa, M., & Ali, H. (2021). Factors Influencing Critical Thinking in Islamic Education in Indonesia: System, Tradition, Culture. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1–19.
- Arifin, M. Z. (2018). *Tradisionalisme Sistem Pendidikan Pesantren Salafiyah Di Era Modernisasi (Studi Kasus Di Pondok Pesantren AssyaRoniyyah Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)*.
- Azra, A. (1999). The Transmission of al-Manar's Reformism to the Malay-Indonesian World: The Cases of al-Imam and al-Munir. *Studia Islamika*, 6(3).
- Azra, A. (2014). Reforms in Islamic education: A global perspective seen from the Indonesian case. *Reforms in Islamic Education: International Perspectives*, 59.
- DP, U. (2022). Pendidikan Islam dalam Perspektif Metode Penelitian Sejarah. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 51–74.

- Fia, O. A., Musthofa, M. A., & Devi, E. K. (2024). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah PT. Fifgroup Muara Sabak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 100–105.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39–53.
- Khalid, H. (2015). The role of institutions in driving economic change: Comparing the thoughts of Ibn Khaldūn and Douglass C. North. *Intellectual Discourse*, 23(2).
- Kuswanto, K., Abidin, Z., Pestano, R. D., & Ikhlas, M. (2024). Critical Thinking, Literacy, and Numeracy as Factors in STEM: Madrasah Student Learning. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(1), 99–114.
- Kuswanto, K., Fajanel, J. V., & Abidin, Z. (2024). Learning Technology Increases the Perception of Online Learning. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 88–98.
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. (2007). Perbandingan Pemerintahan. *Jakarta: Universitas Terbuka*.
- Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(2), 159–178.
- Musthofa, M. A. (2025). Madrasah Teacher Management in Enhancing Students' Understanding of Religious Moderation. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 782–798.
- Selvia, N. L. (2024). Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren dan Majlis Taklim. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(2), 792–808.
- Sulton, A., & Utomo, H. W. (2021). Hibriditas, Mimikri, dan Ambivalensi dalam Cerpen Kupata dan Meneer Chastelein Karya Rosyid H. Dimas: Kajian Poskolonial. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 112–118.
- Zamhari, A. (2010). *Rituals of Islamic spirituality: A study of Majlis Dhikr groups in East Java*. ANU Press.